

# **PROPOSAL SKRIPSI**

**ANALISIS PERAN SISTEM PRANATA SOSIAL DALAM PENYELESAIAN**

**KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT KECAMATAN BRANG REA**

**KABUPATEN SUMBAWA BARAT**



**DISUSUN OLEH;**

**ERWIN WIJAYA**

**IPT 171 007**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**UNIVERSITAS CORDOVA**

**2020**

# **PROPOSAL SKRIPSI**

**ANALISIS PERAN SISTEM PRANATA SOSIAL DALAM PENYELESAIAN  
KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT  
KECAMATAN BRANG REA KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**DISUSUN OLEH;**

**ERWIN WIJAYA**

**IPT 171 007**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**UNIVERSITAS CORDOVA**

**2020**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>Bab I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian .....	5
1.3. Tujuan .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
<b>Bab II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
2.1. Pranata Sosial.....	6
2.1.1. Pengertian Pranata Sosial.....	6
2.1.2. Perbedaan Pranata Sosial dengan Lembaga Sosial .....	8
2.1.3. Ciri-Ciri Pranata Sosial .....	9
2.1.4. Tipe-Tipe Pranata Sosial .....	10
2.1.5. Tujuan dan Fungsi Pranata Sosial.....	12
2.1.6. Macam-Macam Pranata Sosial.....	13
2.2. Konflik sosial masyarakat.....	17
2.2.1. Pengertian Konflik .....	17
2.2.2. Bentuk-bentuk Konflik .....	19
2.2.3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik .....	21
2.2.4. Dampak dari Adanya Konflik terhadap Masyarakat .....	25
2.2.5. Upaya-upaya Untuk Mengatasi Konflik .....	26

2.3. Kerangka pemikiran .....	28
2.4. Perumusan hipotesis .....	31
<b>Bab III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	32
3.2. Lokasi Penelitian.....	32
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	32
3.4. Jenis Penelitian .....	33
3.5. Pelaksanaan Pengumpulan Data .....	33
3.6. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Hasil Penelitian .....	34
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>36</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perubahan sosial yang terjadi dalam penghidupan tata kehidupan bermasyarakat tidak menutup kemungkinan dapat timbul berbagai konflik sosial. Dan, jika konflik sosial tersebut dibiarkan begitu saja, selain akan menjadi lebih besar dan berkembang, juga akan menjadi kendala dalam mewujudkan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konflik sosial merupakan suatu fenomena sosial yang mempunyai berbagai dimensi. Pada umumnya permasalahan sosial sering ditafsirkan sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh siapapun, karena kondisi tersebut tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Hal ini menyebabkan mereka tidak atau kurang dapat melaksanakan peran dan fungsinya di dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks ketahanan sosial masyarakat, kelompok masyarakat penyandang konflik kesejahteraan sosial merupakan kelompok rentan yang perlu dilindungi dan mendapatkan dukungan sosial dalam komunitas. Oleh sebab itu, berbagai upaya telah dilakukan membantu mereka mengatasi permasalahan yang dihadapi agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Kenyataannya berbagai upaya tersebut ternyata belum sepenuhnya berhasil atau bisa mengatasi permasalahan yang ada. Meskipun demikian, ada

komunitas/masyarakat yang dengan cara dan mekanisme masing-masing mampu mengatasi sendiri persoalan-persoalan yang dihadapi. Dengan kata lain, masyarakat tersebut masih tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, meskipun dalam kondisi yang kurang memadai.

Komunitas/masyarakat yang mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi ternyata memiliki nilai-nilai atau norma yang dapat mengatur tata hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat, yang sering disebut pranata sosial. Hal ini berarti nilai-nilai dan norma tersebut sangat dibutuhkan masyarakat dalam memberikan kontribusi pada penanganan konflik kesejahteraan sosial.

Pranata sosial secara fisik memang tidak tampak, tetapi dapat dirasakan keberadaannya, terutama bila hal itu berfungsi dengan baik (Mu'man Nuryana, 2003). Pranata sosial memiliki bentuk dan keragaman sesuai dengan peran dan fungsinya. Keragaman tersebut harus dilihat sebagai khasanah sosial yang dapat dijadikan sebagai modal sosial (*social capital*) di dalam proses pembangunan masyarakat. Permasalahannya adalah bagaimana keragaman pranata sosial dapat sinergi sehingga mampu memberikan kontribusi pada Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu daerah Bahari dengan Kawasan laut yang berpotensi untuk pengembangan *coastal marine culture* tersebar di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Tano, Seteluk, Taliwang, Jereweh, Maluk dan Sekongkang. Selain ke enam kecamatan tersebut terdapat 2 kecamatan lain yang di Kabupaten Sumbawa Barat yang menganut dan mengembangkan budaya lokal asli Sumbawa Barat (*local culture*) yakni kecamatan Brang Rea dan

Brang Ene. Sehingga dari dasar budaya yang berkembang di masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat maka secara alami akan merefleksikan sistem pranata sosial yang dikembangkan dan difungsikan sesuai dengan kebutuhan hajat hidup masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.

Di dalam kehidupan masyarakat, sistem pranata sosial yang dikembangkan relatif beragam dan jumlahnya terus berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat. Setidaknya di dalam masyarakat terdapat lima pranata atau lembaga sosial yang pokok, yaitu: (1) keluarga, (2) pendidikan, (3) ekonomi, (4) politik, dan (5) agama. Namun, menurut ahli antropologi seperti Koentjaraningrat (1990), di luar lembaga pokok yang telah disebutkan tadi, terdapat pranata lain, seperti: pranata ilmiah, pranata keindahan, dan juga pranata rekreasi. Dalam karya klasik tokoh sosiologi Talcott Parsons dan Edward Shills (1951), dinyatakan bahwa proses-proses sosial yang terwujud sebagai tindakan-tindakan sosial pada dasarnya bertujuan untuk dapat saling bekerja sama di antara para pelaku yang merupakan warga masyarakat. Karena itu, proses-proses sosial mempunyai fungsi-fungsi yang menekankan tujuan untuk terwujudnya kehidupan sosial dan kemasyarakatan yang bercorak keseimbangan atau ekuilibrium di antara unsururnya, sehingga menghasilkan adanya integrasi sosial dan integrasi kemasyarakatan. Oleh Parsons dan pengikutnya, tindakan-tindakan yang terwujud sebagai konflik dilihat sebagai penyimpangan, atau tidak fungsional dalam kehidupan manusia.

Pencegahan konflik merupakan upaya yang dilakukan dalam mencegah suatu konflik dengan meningkatkan penerapan UU dan penyesuaian dengan

tatanan adat. Perselisihan antar masyarakat sedapat mungkin diselesaikan dengan segera, sehingga tidak menimbulkan keresahan yang menimbulkan sengketa di masyarakat. Konflik bersifat fungsional secara positif dan negatif (Hussein & Al-Mamary, 2019). Umumnya konflik bersifat negatif yang terjadi di masyarakat adalah dapat merugikan masyarakat karena mengganggu keharmonisan tata kehidupan masyarakat.

Sedangkan konflik yang bersifat positif adalah konflik yang dapat diselesaikan dengan baik sehingga dapat memperbaiki tata kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya. Penegakan hukum adat diatur dalam sistem peradilan adat yang dijalankan oleh Lembaga adat agar hukum adat berlaku efektif (Manarisip, 2012). Tata adat diatur dalam Pasal 40 UU No. 7 Tahun 2012, dimana merupakan peran kelembagaan tata cara dalam penanganan konflik sosial.

Penyelesaian konflik sosial di daerah sebaiknya dilakukan dengan mekanisme melalui Lembaga adat. Ketika mekanisme adat telah ditempuh, pemerintah dan semua pihak harus mengakui hasil dari penyelesaian konflik dengan mekanisme pranata adat ini. Namun bila mekanisme yang dilakukan melalui Lembaga adat tidak berhasil, barulah ditempuh melalui mekanisme lainnya.

Pengakuan kelembagaan adat dalam UU No. 7 Tahun 2012 belum maksimal karena dalam peraturan ini hanya mengakui Lembaga adat yang masih ada, dan peraturan ini tidak mengamanatkan upaya untuk mengembangkan kearifan lokal dalam upaya penyelesaian konflik sosial. Namun dalam Undang-



Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur ketentuan untuk memperkuat Lembaga adat dalam melaksanakan fungsi-fungsi Lembaga adat termasuk fungsi penyelesaian sengketa (Samsul, 2014).

### **1.2. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimanakah eksistensi, peran dan fungsi pranata sosial masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka penyelesaian konflik sosial Masyarakat Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat?”.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi, peran dan fungsi pranata sosial masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka penyelesaian konflik sosial Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari kajian ini adalah:

1. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
2. Memacu persaingan positif, antar institusi sosial masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang dinamika kehidupan masyarakat Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pranata Sosial**

##### **2.1.1. Pengertian Pranata Sosial**

Pranata sosial berasal dari istilah bahasa Inggris *sosial institution*. Istilah-istilah lain pranata sosial ialah lembaga sosial dan bangunan sosial. Walaupun istilah yang digunakan berbeda-beda, tetapi *sosial institution* menunjuk pada unsur-unsur yang mengatur perilaku anggota masyarakat.

Pranata juga berasal dari bahasa latin *instituere* yang berarti mendirikan. Kata bendanya adalah *institution* yang berarti pendirian. Dalam bahasa Indonesia *institution* diartikan institusi (pranata) dan institut (lembaga). Institusi adalah sistem norma atau aturan yang ada. Institut adalah wujud nyata dari norma-norma.

Menurut Koentjaraningrat, istilah pranata dan lembaga sering dikacaukan pengertiannya. Sama halnya dengan istilah *institution* dengan istilah *institute*. Padahal kedua istilah itu memiliki makna yang berbeda.

*Horton dan Hunt (1987)*, menyatakan bahwa pranata sosial adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting. Dengan kata lain, pranata sosial adalah sistem hubungan sosial yang terorganisir yang mengejawantahkan nilai-nilai serta prosedur umum yang mengatur dan memenuhi kegiatan pokok warga masyarakat. Oleh karena itu, ada tiga kata kunci di dalam setiap pembahasan mengenai pranata sosial yaitu:

- a. Nilai dan norma.
- b. Pola perilaku yang dibakukan atau yang disebut prosedur umum.

- c. Sistem hubungan, yakni jaringan peran serta status yang menjadi wahana untuk melaksanakan perilaku sesuai dengan prosedur umum yang berlaku.

Sedangkan menurut pendapat Koentjaraningrat (1979) yang dimaksud dengan pranata-pranata sosial adalah sistem-sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan warga masyarakat itu untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Pranata sosial pada hakikatnya bukan merupakan sesuatu yang bersifat empirik, karena sesuatu yang empirik unsur-unsur yang terdapat didalamnya selalu dapat dilihat dan diamati. Sedangkan pada pranata sosial unsur-unsur yang ada tidak semuanya mempunyai perwujudan fisik. Pranata sosial adalah sesuatu yang bersifat konsepsional, artinya bahwa eksistensinya hanya dapat ditangkap dan dipahami melalui sarana pikir, dan hanya dapat dibayangkan dalam imajinasi sebagai suatu konsep atau konstruksi pikir.

Unsur-unsur dalam pranata sosial bukanlah individu-individu manusianya itu, akan tetapi kedudukan-kedudukan yang ditempati oleh para individu itu beserta aturan tingkah lakunya. Dengan demikian pranata sosial merupakan bangunan atau konstruksi dari seperangkat peranan-peranan dan aturan-aturan tingkah laku yang terorganisir. Aturan tingkah laku tersebut dalam kajian sosiologi sering disebut dengan istilah “norma-norma sosial”.

Pranata sosial itu tidak lain adalah wujud dari respon-respon yang diformulasikan dan disistematisasikan dari segala kebutuhan hidup (Herkovits (1952) dalam Harsojo, (1967). Sedangkan Hetzler (1929) dalam Harsojo (1967) secara lebih rinci mendefinisikan pranata sosial itu sebagai satu konsep yang kompleks dan sikap-sikap yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antara

manusia tertentu yang tidak dapat dielakkan, yang timbul karena dipenuhinya kebutuhan elementer individual, kebutuhan-kebutuhan sosial yang wajib atau dipenuhinya tujuan-tujuan sosial penting. Konsep itu berbentuk keharusan dan kebiasaan, tradisi, dan peraturan. Secara individual pranata sosial itu mengambil bentuk berupa satu kebiasaan yang dikondisikan oleh individu di dalam kelompok, dan secara sosial pranata sosial itu merupakan suatu struktur. Kemudian Elwood (1925) dalam Harsojo (1967), pranata sosial itu dapat juga dikatakan sebagai satu adat kebiasaan dalam kehidupan bersama yang mempunyai sanksi, yang disistematisasikan dan dibentuk oleh kewibawaan masyarakat. Pranata sosial yang penting adalah hak milik, perkawinan, religi, sistem hukum, sistem kekerabatan, dan edukasi (Harsojo, 1967 : 158).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pranata adalah seperangkat aturan yang berkisar pada kegiatan atau kebutuhan tertentu termasuk kebutuhan sosial. Seperangkat aturan yang terdapat dalam pranata termasuk kebutuhan sosial yang berpedoman pada kebudayaan dan juga pranata merupakan seperangkat aturan, bersifat abstrak.

### **2.1.2. Perbedaan Pranata Sosial dengan Lembaga Sosial**

Apabila ditinjau dari pengertian Pranata dan Lembaga sosial, *Institution* (pranata) adalah sistem norma atau aturan yang bersifat spesifik dalam mengatur aktivitas bermasyarakat. Sedangkan *institute* (lembaga) adalah badan atau organisasi yang melaksanakan sistem norma.

Lembaga sosial merupakan wadah untuk mengimplementasikan aturan-aturan khusus, berupa organisasi atau asosiasi. Contohnya KUA, masjid, sekolah,

partai politik, perusahaan, dan sebagainya. Sedangkan pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan yang mengatur perilaku dan hubungan antara anggota masyarakat agar dapat hidup aman, tenteram dan harmonis serta pada akhirnya mencapai keseimbangan sosial. Pranata sosial dapat berupa kesepakatan tidak tertulis namun diakui sebagai aturan tata perilaku dan sopan santun pergaulan. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, perbedaan yang paling nampak adalah lembaga sosial bersifat konkrit, sedangkan pranata sosial bersifat abstrak, namun keduanya saling berkaitan.

Sehingga apabila dilakukan pemetaan perbedaan pranata dan lembaga sosial maka dapat dilihat tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Pranata dan Lembaga**

No	Kegiatan dan Kebutuhan	Pranata	Lembaga
1	Makanan, pakaian, Perumahan	Perdagangan	Keluarga
2	Peran serta politik	Pemilihan umum	Komisi Pemilihan Umum
3	Pengembangan keturunan	Pernikahan	KUA, Catatan Sipil, Tempat Ibadah

### **2.1.3 Ciri-Ciri Pranata Sosial**

Menurut *John Levis Gillin* dan *John Phillpe Gillin* ciri umum pranata sosial adalah sebagai berikut:

- a. Pranata sosial merupakan suatu organisasi pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasilnya terdiri atas adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan, serta unsur-unsur kebudayaan yang secara langsung atau tidak langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional.

- b. Hampir semua pranata sosial mempunyai suatu tingkat kekekalan tertentu sehingga orang menganggapnya sebagai himpunan norma yang sudah sewajarnya harus dipertahankan. Suatu sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan, baru akan menjadi bagian pranata sosial setelah melewati waktu yang sangat lama.
- c. Pranata sosial mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu.
- d. Pranata sosial mempunyai alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan.
- e. Pranata sosial biasanya memiliki lambang-lambang tertentu yang secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsinya.
- f. Pranata sosial mempunyai suatu tradisi tertulis ataupun tidak tertulis yang merupakan dasar bagi pranata yang bersangkutan dalam menjalankan fungsinya. Tradisi tersebut merumuskan tujuan dan tata tertib yang berlaku.

#### **2.1.4 Tipe-Tipe Pranata Sosial**

J.L. Gillin dan J. P. Gillin (1954) mengemukakan bahwa pranata sosial dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pranata dari sudut perkembangan

Dari sudut perkembangannya dikenal 2 macam pranata sosial yaitu :

- 1. *Crescive institutions*, pranata sosial yang tidak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat sehingga disebut juga pranata yang paling primer. Contoh : pranata hak milik, perkawinan, dan agama.

2. *Enacted institutions*, pranata sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contoh : pranata utang-piutang dan pranata pendidikan.

b. Pranata dari sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat

Dari sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat dikenal 2 macam pranata sosial yaitu :

1. *Basic institutions*, pranata sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, misalnya keluarga, sekolah, dan Negara.
2. *Subsidiary institutions*, pranata sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting, misalnya rekreasi.

c. Pranata dari sudut penerimaan masyarakat

Dari sudut penerimaan masyarakat dikenal 2 macam pranata sosial yaitu :

1. *Aproved dan Sanctioned institutions*, pranata sosial yang diterima oleh masyarakat, seperti sekolah dan perdagangan.
2. *Unsantioned institutions*, pranata sosial yang ditolak oleh masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya, misalnya pemerasan, kejahatan, dan pencolongan.

d. Pranata dari Sudut Penyebaran

Dari sudut penyebaran dikenal 2 macam pranata sosial yaitu :

1. *General institutions*, pranata sosial yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat dunia. Misalnya : pranata agama, HAM.

2. *Restructed institutions*, pranata sosial yang hanya dikenal oleh sebagian masyarakat tertentu, misalnya pranata Agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dll.

e. Pranata dari Sudut Fungsi

Dari sudut fungsi dikenal 2 macam pranata sosial yaitu :

1. *Operative institutions*, pranata sosial yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari masyarakat yang bersangkutan, misalnya pranata industri.
2. *Regulative institutions*, pranata sosial yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang ada dalam masyarakat, misalnya pranata hukum seperti Kejaksaan dan pengadilan.

### **2.1.5 Tujuan dan Fungsi Pranata Sosial**

Secara umum, tujuan utama diciptakannya pranata sosial yaitu untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai, dan untuk mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat bisa berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Sebagai contoh, pranata keluarga mengatur bagaimana keluarga harus memelihara anak. Sementara itu, pranata pendidikan mengatur bagaimana sekolah harus mendidik anak-anak hingga menghasilkan lulusan yang handal. Tanpa adanya pranata sosial, kehidupan manusia nyaris bisa dipastikan bakal porak-poranda karena jumlah prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia relatif terbatas, sementara jumlah warga masyarakat yang membutuhkan justru semakin lama semakin banyak.



Untuk mewujudkan tujuannya, menurut Soerjono Soekanto (1970), pranata sosial didalam masyarakat harus dilaksanakan dengan fungsi-fungsi berikut :

1. Memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah laku atau bersikap didalam usaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya.
2. Menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan atau disintegrasi masyarakat.
3. Berfungsi untuk memberikan pegangan dalam mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*).

#### **2.1.6 Macam-Macam Pranata Sosial**

##### **1. Pranata Keluarga**

Keluarga merupakan unit masyarakat yang terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga mempunyai banyak fungsi penting yaitu :

- a. Fungsi Reproduksi: Keluarga merupakan lembaga yang fungsinya mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Dalam masyarakat yang beradab, keluarga adalah satu-satunya tempat untuk tujuan itu. Berlangsungnya fungsi reproduksi berkaitan erat dengan aktivitas seksual laki-laki dan wanita. Dengan berkeluarga, manusia dapat melanjutkan keturunan secara tepat, wajar, dan teratur di lihat dari segi moral, cultural, sosial, dan kesehatan.
- b. Fungsi Afeksi : Salah satu kebutuhan manusia adalah kasih sayang atau rasa saling mencintai. Apabila kebutuhan kasih sayang tidak terpenuhi, keluarga

akan mendapatkan gangguan emosional, masalah perilaku, dan kesehatan fisik.

- c. Fungsi Sosialisasi : Keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama dan paling utama bagi anak sehingga kelak dapat berperan dengan baik di masyarakat. Keluarga sebagai media sosialisasi kelompok primeryang pertama bagi seorang anak, dan dari situlah perkembangan kepribadian dimulai. Pada saat anak sudah cukup umur untuk memasuki kelompok atau media sosialisasi lain diluar keluarga. Pondasi dasar kepribadian anak sudah tertanam secara kuat, dan kepribadiannya pun sudah terarah dengan baik melalui keluarga.
- d. Fungsi Ekonomi : Keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota keluarganya. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, semua anggota keluarga melakukan kerja sama. Pada umumnya, seorang suami melakukan kegiatan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan keluarga, sedangkan isteri berfungsi mengatur keuangan dan belanja keluarga.

## 2. Pranata Ekonomi

Pranata ekonomi adalah pranata sosial yang menangani masalah kesejahteraan materiil, yang mengatur kegiatan atau cara memproduksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup masyarakat agar semua lapisan masyarakat mendapatkan bagian yang semestinya.

Fungsi pranata ekonomi yaitu :

- a. Memelihara ketertiban,

- b. Mencapai consensus,
- c. Meningkatkan produksi ekonomi semaksimal mungkin.

Contoh dari Pranata Ekonomi adalah , bertani, industri, bank, koperasi dan sebagainya.

### 3. Pranata Politik

Pranata Politik adalah peraturan-peraturan untuk memelihara tata tertib, untuk mendamaikan pertentangan-pertentangan dan untuk memilih pemimpin yang wibawa. Fungsi pranata politik yaitu :

- a. Melaksanakan undang-undang yang telah disahkan,
- b. Melembagakan norma melalui undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif,
- c. Menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi diantara warga masyarakat, dll.

Contoh Pranata politik adalah seperti sistem hukum, sistem kekuasaan, partai, wewenang, pemerintahan.

### 4. Pranata Pendidikan

Tujuan pranata pendidikan ialah memberikan ilmu pengetahuan, pendidikan sikap, dan melatih keterampilan kepada warga agar seseorang dapat mandiri dalam mencari penghasilan. Contohnya seperti Kegiatan Belajar Mengajar, sistem pengetahuan, aturan, kursus, pendidikan keluarga, ngaji.

### 5. Pranata Kepercayaan/Agama

Fungsi pokok pranata agama adalah memberikan pedoman bagi manusia untuk berhubungan dengan Tuhannya dan memberikan dasar perilaku yang ajeg

dalam masyarakat. Contohnya seperti upacara semedi, tapa, zakat, infak, haji dan ibadah lainnya.

#### 6. Pranata Kesenian

Fungsi Pranata Kesenian adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia akan keindahan, contohnya seperti seni suara, seni lukis, seni patung, seni drama, dan sebagainya.

#### 7. Hubungan Antarpranata

Dalam masyarakat terdapat bermacam-macam pranata sosial yang saling berhubungan. Contohnya dalam masyarakat Jakarta merupakan suatu tatanan yang terdiri dari berbagai pranata sosial yang saling berkaitan, antara lain pranata keluarga, pranata pendidikan, pranata politik, pranata agama, dll.

#### 8. Pranata Total

Masyarakat merupakan tatanan pranata sosial. Kehidupan dalam masyarakat berarti adanya kesempatan berpindah dari satu pranata ke pranata lain. Warga masyarakat mengalami perpindahan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kehidupan siswa SMA biasanya sejak pagi hingga malam hari ditandai oleh perpindahan tersebut. Pagi hari ketika bangun tidur siswa berada dalam pranata keluarga. Norma-norma yang mengatur, cara berpikir, bertindak, dan berperasaan bersumber pada pranata keluarga. Kemudian pindah ke pranata pendidikan dan rekreasi. Begitu seterusnya sampai pulang ke rumah.

## 9. Pranata Dominan

Pranata dominan merupakan pranata sosial yang menuntut loyalitas penuh dari orang-orang yang berada di bawah naungannya. Contohnya militer dan pranata sekte keagamaan

### 2.2. Konflik sosial masyarakat

#### 2.2.1. Pengertian Konflik

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja.

Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial.

Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satu pun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan sebagainya. Dari setiap konflik ada beberapa diantaranya yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan. Kekerasan merupakan gejala tidak dapat diatasinya akar konflik sehingga menimbulkan kekerasan dari model kekerasan yang terkecil hingga peperangan.

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “*con*” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan (Elly dkk,

2011). Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional. Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya (Irving, 1998).

Konflik artinya percekocan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan (Balai Pustaka, 2005). Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku (Soerjono, 1993).

Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan (J. Dwi dan Bagong, 2005).

Menurut lawang konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas (Robert, 1994).

Dari berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik adalah percekocan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau

masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan.

Konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas

Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai ketaraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya.

### **2.2.2. Bentuk-bentuk Konflik**

Secara garis besar berbagai konflik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk konflik berikut ini:

#### **1. Berdasarkan sifatnya**

Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif.

##### **a. Konflik Destruktif**

Merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik Poso, Ambon, Kupang, Sambas, dan lain sebagainya.

b. Konflik Konstruktif

Merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi (Robert, 2001).

2. Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik

a. Konflik Vertikal

Merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor.

b. Konflik Horizontal

Merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi massa.

c. Konflik Diagonal

Merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya konflik yang terjadi di Aceh (Kusnadi, 2002).

Soerjono Soekanto membagi konflik sosial menjadi lima bentuk yaitu:

- a. Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya.



- b. Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan-perbedaan ras.
- c. Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial.
- d. Konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok.
- e. Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara (Soekanto, 1992).

Sementara itu, Ralf Dahrendorf (2001) mengatakan bahwa konflik dapat dibedakan atas empat macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau biasa disebut dengan konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan di mana individu menghadapi harapan-harapan yang berlawanan dari bermacam-macam peranan yang dimilikinya.
- b. Konflik antara kelompok-kelompok sosial.
- c. Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir.
- d. Konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antar negara, atau organisasi internasional.

### **2.2.3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik**

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas

sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaanya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat (Elly M, dkk, 2011).

Ketidak merataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang perolehan asset sosial relatif sedikit atau kecil. Sementara pihak yang telah mendapatkan pembagian asset sosial tersebut berusaha untuk mempertahankan dan bisa juga menambahinya. Pihak yang cenderung mempertahankan dan menambahinya disebut sebagai status quo dan pihak yang berusaha mendapatkannya disebut sebagai status need. Pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik dibagi dua, yaitu:

1. Kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang mejemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, sopir dan cendekiawan. Kemajemukan horizontal-kultural menimbulkan konflik yang masing-masing unsur kultural tersebut mempunyai karakteristik sendiri dan masing-masing penghayat budaya tersebut ingin mempertahankan karakteristik budayanya tersebut. Dalam masyarakat yang strukturnya seperti ini, jika belum ada konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik yang terjadi dapat menimbulkan perang saudara.

2. Kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial karena ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara sebagian besar tidak atau kurang memiliki kekayaan, pendidikan rendah, dan tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pembagian masyarakat seperti ini merupakan benih subur bagi timbulnya konflik sosial (Elly M, dkk, 2011).

Namun menurut J. Dwi dan Bagong (2005) dan Astrid (2006) beberapa sosiolog menjabarkan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik, diantaranya yaitu:

1. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu.

Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya. Membinasakan disini tidak selalu diartikan sebagai pembinasakan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak disetujui. Di dalam realitas sosial tidak ada satu pun individu yang memiliki karakter yang sama sehingga perbedaan pendapat, tujuan, keinginan tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial.

## 2. Perbedaan kebudayaan.

Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula di kalangan khalayak kelompok yang luas. Selain itu, perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya sikap etnosentrisme yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya adalah yang paling baik. Jika masing-masing kelompok yang ada di dalam kehidupan sosial sama-sama memiliki sikap demikian, maka sikap ini akan memicu timbulnya konflik antar penganut kebudayaan.

## 3. Perbedaan kepentingan.

Mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana.

Perbedaan pendirian, budaya, kepentingan, dan sebagainya tersebut diatas sering terjadi pada situasi-situasi perubahan sosial. Dengan demikian perubahan-perubahan sosial itu secara tidak langsung dapat dilihat sebagai penyebab juga terjadinya (peningkatan) konflik-konflik sosial. Perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat akan mengakibatkan berubahnya sistem nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dan perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat ini akan menyebabkan perbedaan-perbedaan pendirian dalam masyarakat.

#### **2.2.4. Dampak dari Adanya Konflik terhadap Masyarakat**

Tak perlu diragukan lagi, proses sosial yang namanya konflik itu adalah suatu proses yang bersifat disosiatif. Namun demikian, sekalipun sering berlangsung dengan keras dan tajam, proses-proses konflik itu sering pula mempunyai akibat-akibat yang positif bagi masyarakat. Konflik-konflik yang berlangsung dalam diskusi misalnya, jelas akan unggul, sedangkan pikiran-pikiran yang kurang terkaji secara benar akan tersisih. Positif atau tidaknya akibat konflik-konflik memang tergantung dari persoalan yang dipertentangkan, dan tergantung pula dari struktur sosial yang menjadi ajang berlangsungnya konflik. Oleh karena itu ada dua dampak dari adanya konflik terhadap masyarakat yaitu:

1. Dampak positif dari adanya konflik.
  - a. Bertambahnya solidaritas intern dan rasa in-group suatu Kelompok.  
Apabila terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok, solidaritas antar anggota di dalam masing-masing kelompok itu akan meningkat sekali. Solidaritas di dalam suatu kelompok, yang pada situasi normal sulit dikembangkan, akan langsung meningkat pesat saat terjadinya konflik dengan pihak-pihak luar.
  - b. Konflik di dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga\masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peranan tertentu di dalam masyarakat (J. Dwi dan Bagong, 2005).

## 2. Dampak negatif dari adanya konflik

- a. Hancurnya kesatuan kelompok. Jika konflik yang tidak berhasil diselesaikan menimbulkan kekerasan atau perang, maka sudah barang tentu kesatuan kelompok tersebut akan mengalami kehancuran (Elly dan Usman, 2011).
- b. Adanya perubahan kepribadian individu. Artinya, di dalam suatu kelompok yang mengalami konflik, maka seseorang atau sekelompok orang yang semula memiliki kepribadian pendiam, penyabar menjadi beringas, agresif dan mudah marah, lebih-lebih jika konflik tersebut berujung pada kekerasan (Elly dan Usman, 2011).
- c. Hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Antara nilai-nilai dan norma sosial dengan konflik terdapat hubungan yang bersifat korelasional, artinya bisa saja terjadi konflik berdampak pada hancurnya nilai-nilai dan norma sosial akibat ketidak patuhan anggota masyarakat akibat dari konflik (J. Dwi dan Bagong, 2005).

### 2.2.5. Upaya-upaya Untuk Mengatasi Konflik

Secara sosiologi, proses sosial dapat berbentuk proses sosial yang bersifat menggabungkan (*associative processes*) dan proses sosial yang menceraikan (*dissociative processes*). Proses sosial yang bersifat asosiatif diarahkan pada terwujudnya nilai-nilai seperti keadilan sosial, cinta kasih, kerukunan, solidaritas. Sebaliknya proses sosial yang bersifat dissosiatif mengarah pada terciptanya nilai-nilai negatif atau asosial, seperti kebencian, permusuhan, egoisme, kesombongan, pertentangan, perpecahan dan sebagainya. Jadi proses

sosial asosiatif dapat dikatakan proses positif. Proses sosial yang dissosiatif disebut proses negatif. Sehubungan dengan hal ini, maka proses sosial yang asosiatif dapat digunakan sebagai usaha menyelesaikan konflik (Soetomo, 1995).

Adapun bentuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai, yakni konsiliasi, mediasi, arbitrase, koersi (paksaan), *détente*. Urutan ini berdasarkan kebiasaan orang mencari penyelesaian suatu masalah, yakni cara yang tidak formal lebih dahulu, kemudian cara yang formal, jika cara pertama membawa hasil (Nasikun, 2003).

Menurut Nasikun (2003), bentuk-bentuk pengendalian konflik ada enam yaitu:

1. Konsiliasi (*conciliation*)

Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan.

2. Mediasi (*mediation*)

Bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka.

3. Arbitrase (*arbitrium*)

artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan. Arbitrase berbeda dengan konsiliasi dan mediasi. Seorang arbiter memberi keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang

bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi.

#### 4. Perwasitan

Di dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Manusia dalam kehidupannya di suatu lingkungan selalu berpranata. Tidak terkecuali masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat yang pengembangan *coastal marine culture* dan *local culture*. Sehingga dari dasar budaya yang berkembang di masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat maka secara alami akan merefleksikan sistem pranata sosial yang dikembangkan dan difungsikan sesuai dengan kebutuhan hajat hidup masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.

Di dalam kehidupan masyarakat, sistem pranata sosial yang dikembangkan relatif beragam dan jumlahnya terus berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat. Setidaknya di dalam masyarakat terdapat lima pranata atau lembaga sosial yang pokok, yaitu: (1) keluarga, (2) pendidikan, (3) ekonomi, (4) politik, dan (5) agama. Namun, menurut ahli antropologi seperti Koentjaraningrat (1990), di luar lembaga pokok yang telah disebutkan tadi, terdapat pranata lain, seperti: pranata ilmiah, pranata keindahan, dan juga pranata rekreasi.



Adapun proses-proses sosial yang terwujud sebagai tindakan-tindakan sosial pada dasarnya bertujuan untuk dapat saling bekerja sama di antara para pelaku yang merupakan warga masyarakat. Karena itu, proses-proses sosial mempunyai fungsi-fungsi yang menekankan tujuan untuk terwujudnya kehidupan sosial dan kemasyarakatan yang bercorak keseimbangan atau ekuilibrium di antara unsururnya, sehingga menghasilkan adanya integrasi sosial dan integrasi kemasyarakatan. tindakan-tindakan yang terwujud sebagai konflik dilihat sebagai penyimpangan, atau tidak fungsional dalam kehidupan manusia.

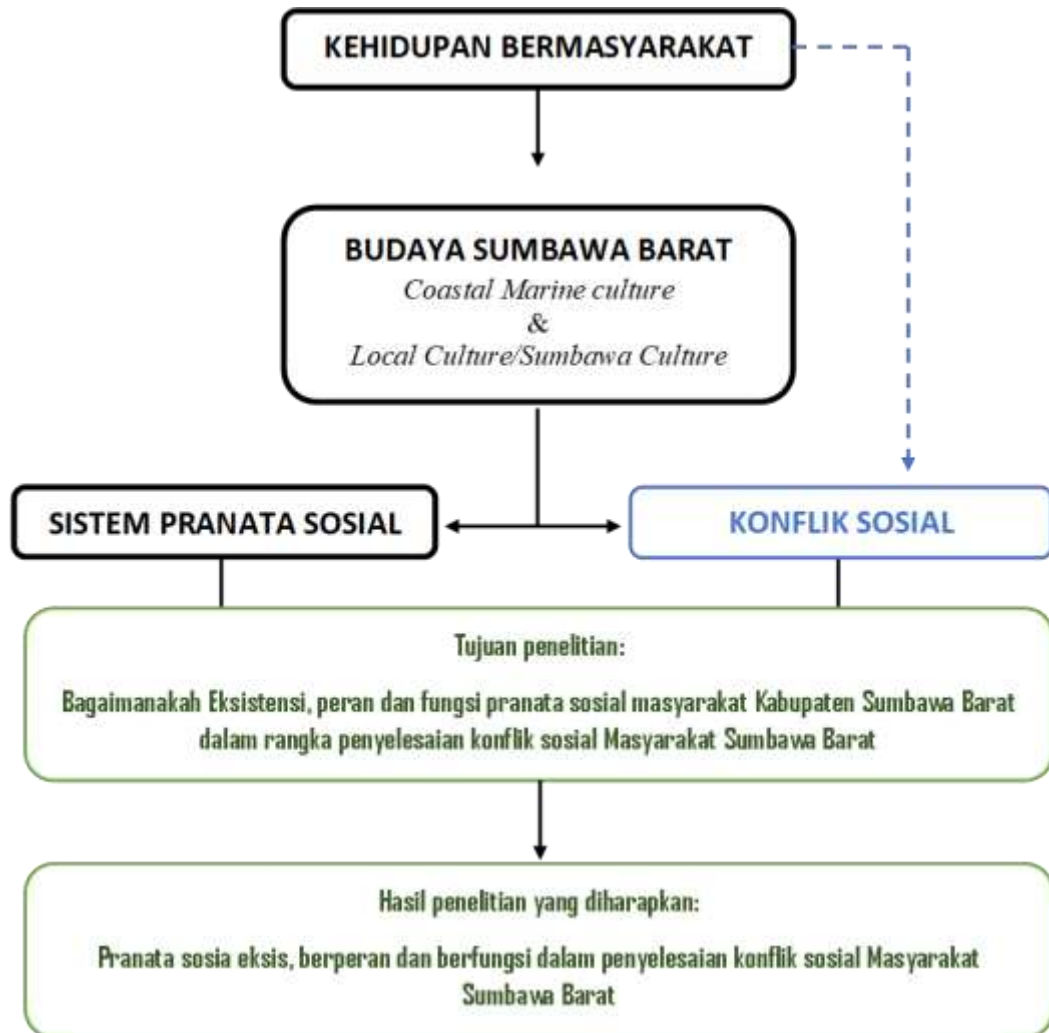
Sehingga Pencegahan konflik merupakan upaya yang dilakukan dalam mencegah suatu konflik dengan meningkatkan penerapan UU dan penyesuaian dengan tatanan adat. Perselisihan antar masyarakat sedapat mungkin diselesaikan dengan segera, sehingga tidak menimbulkan keresahan yang menimbulkan sengketa di masyarakat. Konflik bersifat fungsional secara positif dan negatif. Umumnya konflik bersifat negatif yang terjadi di masyarakat adalah dapat merugikan masyarakat karena mengganggu keharmonisan tata kehidupan masyarakat. Sedangkan konflik yang bersifat positif adalah konflik yang dapat diselesaikan dengan baik sehingga dapat memperbaiki tata kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya.

Penegakan hukum adat diatur dalam sistem peradilan adat yang dijalankan oleh Lembaga adat agar hukum adat berlaku efektif. Tatanan adat diatur dalam Pasal 40 UU No. 7 Tahun 2012, dimana merupakan peran kelembagaan tata cara dalam penanganan konflik sosial. Penyelesaian konflik sosial di daerah sebaiknya dilakukan dengan mekanisme melalui Lembaga adat. Ketika mekanisme adat

telah ditempuh, pemerintah dan semua pihak harus mengakui hasil dari penyelesaian konflik dengan mekanisme pranata adat ini. Namun bila mekanisme yang dilakukan melalui Lembaga adat tidak berhasil, barulah ditempuh melalui mekanisme lainnya. Namun pengakuan atas kelembagaan adat belum maksimal karena dalam peraturan ini hanya mengakui Lembaga adat yang masih ada, dan peraturan ini tidak mengamanatkan upaya untuk mengembangkan kearifan lokal dalam upaya penyelesaian konflik sosial. Namun dalam Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur ketentuan untuk memperkuat Lembaga adat dalam melaksanakan fungsi-fungsi Lembaga adat termasuk fungsi penyelesaian sengketa.

Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut di atas diperlukan suatu upaya penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Eksistensi pranata sosial masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka penyelesaian konflik sosial Masyarakat Sumbawa Barat, serta peran dan fungsi pranata sosial masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka penyelesaian konflik sosial Masyarakat Sumbawa Barat. Untuk lebih jelasnya maka kerangka berpikir dapat digambarkan dalam bagan kerangka berpikir seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



#### 2.4. Perumusan Hipotesis

$H_0$  : Pranata sosial tidak eksis, tidak berperan dan tidak berfungsi dalam penyelesaian konflik sosial Masyarakat Sumbawa Barat

$H_a$  : Pranata sosial eksis, berperan dan berfungsi dalam penyelesaian konflik sosial Masyarakat Sumbawa Barat

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian tentang Analisis Peran Sistem Pranata Sosial Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Masyarakat kecamatan Brang Rea Sumbawa Barat ini akan dilakukan pada bulan Maret 2020 di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat.

#### **3.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Desa tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat. Lokasi penelitian di tetapkan secara *Purposive Sampling* dengan alasan daerah tersebut merupakan daerah rawan terjadinya konflik sosial di Kabupaten Sumbawa Barat.

#### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Sedangkan jenis sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer dikumpulkan dari narasumber atau responden di lapangan seperti Kepala Desa, perwakilan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Pemuda. Sedangkan Data Sekunder yang dikumpulkan berupa dokumentasi hasil penelitian dan informasi dari narasumber atau responden yang berasal dari badan ataupun dinas pemerintah seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Desa dan instansi terkait lainnya.

### **3.4. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif akan menjelaskan dan menggambarkan data dan informasi, serta analisis data yang komprehensif mengenai Penelitian tentang Analisis Peran Sistem Pranata Sosial Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Masyarakat Kecamatan Brang Rea Sumbawa Barat.

### **3.5. Pelaksanaan Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Studi dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data sekunder dari sejumlah instansi terkait seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Desa dan instansi ataupun dinas terkait lainnya serta dokumentasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

2. Interview

Studi lapangan bertujuan untuk mendapatkan data primer dari sejumlah narasumber atau Responden yang berkaitan dengan kondisi Masyarakat Desa Sampel. Studi lapangan dilakukan melalui Survey dan wawancara mendalam (indepth-interview).

**Tabel 3.1**  
**Teknik Pengumpulan Data**

<b>Tema</b>	<b>Data yang diambil</b>	<b>Teknik Pengambilan Data</b>	<b>Responden/ Informan</b>
Analisis Eksistensi Sistem Pranata Sosial Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Masyarakat Sumbawa Barat	Struktur organisasi dan program kerja	Studi lapangan ( <i>Field Research</i> ) dengan Wawancara mendalam dan survey.	Kepala desa, Pemangku Adat ataupun Kelompok Masyarakat
Analisis Peran dan fungsi Sistem Pranata Sosial Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Masyarakat Sumbawa Barat	a. Kondisi internal dan eksternal Pranata Sosial Masyarakat Kabupaten Sumbawa b. Barat Budaya: aspek nilai-nilai berkaitan Pranata Sosial Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Rangka Pencegahan Peredaran Narkoba	Studi lapangan ( <i>Field Research</i> ) dengan Wawancara mendalam dan survey.	Kepala desa, Pemangku Adat ataupun Kelompok Masyarakat

### 3.6. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Hasil

Metode pengolahan data atau metode analisis data yang digunakan pada penelitian Fungsi Pranata Sosial Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Rangka Pencegahan konflik sosial masyarakat adalah metode analisis Deskriptif Kualitatif dengan alat analisis ANSOS (Analisa Sosial). Terdapat dua macam ANSOS menurut Anthony Giddens yaitu Analisis Institusional dan Analisis Perilaku Strategis. Analisis Institusional menekankan kepada keterampilan dan kesadaran aktor yang memperlakukan institusi sebagai sumber daya dan aturan yang diproduksi terus menerus, Analisis Perilaku Strategis yang memberikan penekanan institusi sebagai sesuatu yang direproduksi secara sosial. Data yang dianalisis disajikan dalam bentuk hasil analisis yang dapat berupa penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, gambar dan diagram hasil analisis data.

Penelitian Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astrid Susanto, 2006. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bandung: Bina Cipta. Hal. 70.
- Balai Pustaka, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 587.
- Dr. Robert H. Lauer, 2001. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta : PT. Rineka Cipta. Hal. 102.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 361.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 345.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 377.
- Irving M. Zeitlin, 1998. *Memahami Kembali Sosiologi*. Yogyakarta: Gajah Mada University. Hal. 156.
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2005. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 68.
- Koentjaraningrat, 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kusnadi, 2002. *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*. Malang: Taroda. Hal. 67.
- Nasikun, 2003. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 22.



Robert Lawang, 1994. *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Universitas Terbuka. Hal. 53.

Robert, H. Lauer, 2001. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta : PT. Rineka Cipta. Hal. 98.

Soerjono Soekanto, 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 86.

\_\_\_\_\_. 1993. *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 99.

Soetomo, 1995. *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya. Hal. 77.

Talcott Parsons & Edward Shils, 1951, *Toward A General Theory of Action*, New York: Harper & Row.

Nasikun, 2003. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 22.